

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Coronavirus disease* atau yang dikenal sebagai Covid-19 adalah penyakit pernapasan yang dapat menyebar dari orang ke orang. Covid-19 pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir 2019 dan menyebar dengan cepat dari satu kota ke seluruh wilayah di China dalam kurun waktu 30 hari. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) sampai tahun 2020, *Coronavirus disease 2019* (Covid-19) telah tersebar dari 122 negara termasuk Indonesia. Sementara di Indonesia Covid-19 telah menyebar ke 279 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi [1].

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan Virus Corona agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, yang telah diimplementasi selama masa penularan wabah Covid-19 ialah kebijakan berdiam diri di rumah, pembatasan sosial, pembatasan fisik, penggunaan alat pelindung diri, menjaga kesehatan diri, bekerja dan belajar dari rumah, pembatasan sosial berskala besar hingga kebijakan *new normal*. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Nasional Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Presiden Nomor 11 yang menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Keputusan tersebut berubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang

penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Guna mengendalikan <sup>1</sup> meliputi kecepatan penyebaran dan penularannya maka kebijakan mengenai pembatasan kegiatan, pembatasan akses dan karantina untuk menangani percepatan penyebaran Covid-19. [2][3][4][5]

Penetapan kebijakan pemerintah tersebut dianggap sebagai upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan juga upaya untuk memecahkan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam periode waktu tertentu. Pada penelitian lain dikatakan bahwa kebijakan tersebut juga didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak sebagai tahapan untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi. [6]

Kepatuhan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya ialah pengetahuan dan sikap dari masyarakat itu sendiri. Banyaknya masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang tepat mengenai protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19. Sikap dari masyarakat juga membentuk kepatuhan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh masyarakat yang memiliki sikap mendukung terhadap protokol pencegahan Covid-19. Sikap masyarakat terbentuk karena adanya kepercayaan bahwa kebijakan ini efektif mengurangi penyebaran Covid-19. Kepercayaan masyarakat kepada kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor yang meningkatkan

kepatuhan karantina. sehingga kepatuhan dalam protokol kesehatan akan meningkat pada masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa kebijakan protokol Covid-19 efektif mengurangi penyebaran Covid-19.[6][7]

Penelitian lain mengatakan bahwa kepatuhan masyarakat dalam mematuhi kebijakan pemerintah dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dari masyarakat, faktor lingkungan dan faktor kelonggaran dalam kebijakan tersebut. sehingga penting sekali untuk fokus dan mempromosikan kepatuhan terhadap peraturan yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga diwajibkan untuk melakukan karantina sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan karantina tersebut juga dilakukan di lingkungan Akademi Kepolisian kota Semarang tepatnya di RS Bhayangkara Akademi Kepolisian Semarang.[8]

Kepatuhan merupakan bagian dari perilaku seseorang, dimana perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa faktor khususnya perilaku yang berhubungan dengan kesehatan. Perilaku seseorang dijelaskan dalam teori *Lawrence Green* (1980) dan *Snehendu B.Kar* (1983). *Lawrence Green* mengatakan dalam teorinya, perilaku seseorang dapat dianalisis melalui tiga faktor. Faktor pertama, *Predisposing Factors* atau faktor pendorong merupakan faktor yang memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan perilaku kesehatan meliputi pengetahuan, sikap dan kepercayaan atau keyakinan seseorang. Faktor kedua, *Enabling Factors* atau faktor

pendukung merupakan faktor yang memungkinkan membentuk perilaku kesehatan seseorang meliputi ketersediaan akses pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan. Faktor ketiga, *Reinforcing Factors* atau faktor pendorong merupakan perilaku petugas kesehatan, tokoh masyarakat atau pimpinan yang merupakan contoh dalam perilaku masyarakat. [9]

Berdasarkan hasil survey pendahuluan di Akademi Kepolisian (Akp) Semarang, terdapat 141 pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 dalam periode waktu 2019-2020 dan merupakan anggota Akp di Semarang. Akademi Kepolisian sendiri memiliki kebijakan kepada seluruh anggota tetap Akp untuk mematuhi protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi dan melakukan karantina di RS Bhayangkara Akp Semarang bagi yang terkonfirmasi positif covid-19. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dari 141 pasien yang terkonfirmasi positif covid-19 masih ada anggota Akp yang tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan hingga melakukan karantina di RS Bhayangkara Akp Semarang.

Urgensi kepatuhan di Akademi Kepolisian terletak dari kondisi permukiman tersentral dengan perkantoran dan lokasi pendidikan di masa pandemi. Sentralisasi ini membutuhkan tingkat kepatuhan tinggi mengingat keterbatasan akses menjadi pedang bermata dua di mana saat karantina terjadi kondisi ini mampu melindungi komunitas, namun saat pertahanan ini terganggu atau telah dimasuki virus, maka penyebarannya akan lebih masif karena seluruh penduduk terletak di lokasi yang sama dengan terbatasnya

akses keluar. Begitu pula dengan vaksinasi, vaksinasi memiliki peran penting dalam membangun *herd immunity* di Akademi Kepolisian. Akan tetapi masih ditemukan penurunan partisipasi pada vaksinasi booster. Meskipun pandemi telah usai, namun manusia tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan virus dan bakteri saat ini kian masif. Kajian ini mampu menjadi referensi kepatuhan didalam pandemi lainnya bagi kawasan tersentral serupa dengan Akademi Kepolisian. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti ingin meninjau terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada anggota Akpol di Semarang.

## **B. Perumusan Masalah**

Selama pandemi covid-19, upaya pencegahan dan deteksi telah dilakukan dan disesuaikan dengan *positive rate* Akpol. Pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19 di lingkungan Akademi Kepolisian Semarang mencapai 141 pasien, namun berdasarkan data vaksinasi, menunjukkan bahwasanya hasil data tersebut belum mencapai target sasaran. Masih ada anggota Akpol yang belum melaksanakan vaksinasi. Anggota Akpol juga diminta untuk mematuhi penerapan protokol kesehatan dan mengikuti proses vaksinasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat anggota Akpol yang tidak mematuhi kebijakan tersebut. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat Akpol memiliki permukiman yang tersentral, jika kepatuhan tidak dilaksanakan dengan baik maka potensi penularan Covi-19

makin tinggi, ditambah dengan kepatuhan vaksinasi yang belum optimal menghalangi proses pembentukan *herd immunity* di Akademi Kepolisian.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada anggota Akpol di Semarang dilihat dari *predisposing factors*, *enabling factors*, dan *reinforcing factors*. Rumusan masalah kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Predisposing Factors* pada anggota Akpol di Semarang?
2. Bagaimana kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Enabling Factors* pada anggota Apol di Semarang?
3. Bagaimana kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Reinforcing Factors* pada anggota Akpol di Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini kemudian memiliki dua tujuan yaitu tujuan penelitian secara umum dan khusus.

Uraian tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum  
Menganalisis kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada anggota Akpol di Semarang.
2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Predisposing Factors* pada anggota Akpol di Semarang.
- b. Menganalisis kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Enabling Factors* pada anggota Apol di Semarang.
- c. Menganalisis kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi dari *Reinforcing Factors* pada anggota Akpol di Semarang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, manfaat dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan vaksinasi selama pandemi di permukiman tersentral seperti di Akademi Kepolisian dan permukiman lain sejenis. Kemudian, secara praktis manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Akademi Kepolisian Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada anggota Akpol di Semarang.

2. Bagi Program Magister Epidemiologi Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

Dapat menjadi tambahan daftar pustaka serta menambah bahasan sebagai referensi atau pembelajaran bagi peneliti lainnya terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi pada anggota Akpol.

#### E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

<b>Nama Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Metode dan Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	<b>Kebaharuan</b>
Riyadi dan Putri Larasaty “Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Masyarakat pada Protokol Kesehatan Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19”	Analisis deskriptif terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan, status reaksi responden menghadapi wabah covid-19, persepsi keefektifan tindakan isolasi diri, tingkat kekhawatiran, tingkat pendidikan,	Rata-rata indeks kepatuhan responden dari kalangan muda dan berjenis kelamin laki-laki dalam penerapan protokol kesehatan dibanding dari kalangan dengan umur lebih tua dan berjenis kelamin perempuan. Status	Persamaan: Mengkaji tentang kepatuhan protokol kesehatan di masa pandemi berdasarkan karakter demografi dan sosial. Perbedaan: Lokasi penelitian bukan permukiman tersentral, Fokus	Penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan di permukiman tersentral dengan akses terbatas serta sistem komando sehingga kepatuhan sangat dibutuhkan untuk mencegah persebaran Covid-19 ditinjau dari <i>predisposing</i>



Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
status pernikahan, status kesehatan, usia, status bekerja dan jumlah anggota rumah.	kesehatan responden yang mempunyai pengaruh cukup tinggi terhadap kepatuhan responden, dimana kesehatannya rendah cenderung lebih patuh pada protokol kesehatan. Seseorang dengan status telah menikah dan tingkat pendidikan tinggi akan lebih mematuhi penerapan protokol kesehatan.	pada responden kalangan muda dan kepatuhan difokuskan pada protokol kesehatan saja.	<i>factors, enabling factors, dan reinforcing factors.</i>	

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
Melinda Triana Pangaribuan dan Adis Imam Munandar “Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi Covid-19	Kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari buku, media kabar, maupun jurnal-jurnal penelitian. Variabel penelitian ini adalah Pemerintah DKI Jakarta, Covid-19, Sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan.	Kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan masih mengalami hambatan yang berasal dari faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah. Koordinasi yang lemah antara pemerintahn pusat dan pemerintah daerah menimbulkan	Persamaan: Mengkaji tentang kepatuhan akan kebijakan dalam penanganan Covid-19. Perbedaan: Lokasi penelitian dan fokus kajian bukan hanya diregulasi saja namun juga mencakup pengetahuan, kepercayaan, sikap dan kepemimpinan.	Penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan di permukiman tersentral dengan akses terbatas serta sistem komando sehingga kepatuhan sangat dibutuhkan untuk mencegah persebaran Covid-19 ditinjau dari <i>predisposing factors, enabling factors,</i> dan <i>reinforcing factors.</i>

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
		ketidakpastian langkah strategis dan dapat menimbulkan kebingungan publik dalam memahami situasi pandemi.		
Alda Maharanti Aradisti, RR Amanda Pasca Rini, Nindia Pratitis "Hubungan Antara <i>Health Belief Model</i> dengan Perilaku Kepatuhan Kebijakan Pembatasan Sosial	Pengambilan sampel menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dengan 159 responden. Hasil analisis menggunakan korelasi <i>Spearman</i> n=159.	Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat provinsi DKI Jakarta Jawa Barat, dan Jawa Timur mempunyai <i>Health Belief Model</i> dan tingkat kepatuhan tergolong	Persamaan: Mengkaji tentang kepatuhan selama pandemi Covid-19. Perbedaan: Metode penelitian, lokasi penelitian dan fokus penelitian di mana penelitian ini menitikberatkan	Penelitian ini mengkaji tentang kepatuhan di permukiman tersentral dengan akses terbatas serta sistem komando sehingga kepatuhan sangat dibutuhkan untuk mencegah persebaran Covid-19 ditinjau dari

Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode dan Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Kebaharuan
Berskala Besar (PSBB) Selama Pancemi Covid-19 pada <i>Emerging Adult</i> ’		sedang, <i>Health Belief Model</i> mempunyai hubungan yang sedang dengan kepatuhan kebijakan PSBB serta <i>perceived barrier</i> mempunyai hubungan yang lemah dengan perilaku kepatuhan kebijakan PSBB.	pada emerging adult.	<i>predisposing factors, enabling factors, dan reinforcing factors.</i>

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2023.

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa memang penelitian tentang kepatuhan telah banyak dilaksanakan sebelumnya, namun belum ada yang mengkaji kepatuhan di lingkungan Akademi Kepolisian. Akademi Kepolisian memiliki keunikan tersendiri di mana dengan sentralisasi permukiman dan sistem komando, maka dinilai angka kepatuhannya tinggi sehingga saat pandemi memiliki *positivity rate* yang rendah. Namun, dengan segala ketegasan dan regulasi yang diberlakukan, masih terjadi peningkatan kasus positif. Hal ini pun

yang mengusik peneliti tentang bagaimana kepatuhan akan protokol kesehatan dan vaksinasi berlaku di Akademi Kepolisian dengan mempertimbangkan *predisposing factors*, *enabling factors*, dan *reinforcing factors*.

## **F. Ruang Lingkup**

### 1. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan September 2022 hingga Juli 2023. Akan tetapi *time series* yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peristiwa-peristiwa terkait protokol kesehatan dan vaksinasi selama pandemi tahun 2020-2022.

### 2. Ruang Lingkup Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Akademi Kepolisian Semarang.

### 3. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini termasuk ke dalam penerapan disiplin ilmu epidemiologi bidang kesehatan.